

Ekonomi Lokal dan Pembangunan Pedesaan di Dusun Berambai, Kalimantan Timur

Arman ^{1,*}  dan Asep Saefuddin ² 

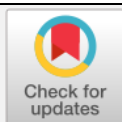
¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Bioindustri, Universitas Trilogi, 12760, Jakarta, Indonesia

² Program Studi Statistika dan Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, 16680, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: arman@universitas-trilogi.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Arman, A., & Saefuddin, A.
(2020). The Local Economy and Rural Development in Berambai Hamlet, East Kalimantan. *Society*, 8(2), 506-516.

DOI: [10.33019/society.v8i2.202](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.202)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 26 Juni, 2020;

Diterima: 27 Oktober, 2020;

Dipublikasi: 10 Desember, 2020;

ABSTRAK

Peran ekonomi lokal semakin terkikis akibat masuknya permodalan di pedesaan. Penelitian ini mengkaji pengaruh industri pertambangan batu bara terhadap eksistensi perekonomian lokal di Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif; sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara bertahap melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian dan mata pencaharian masyarakat di Dusun Berambai mengalami tekanan dan tergerus akibat kegiatan penambangan batu bara. Produk mata pencaharian menyusut drastis, terutama ikan dan beras akibat limbah tambang mencemari sungai dan perubahan lahan pertanian menjadi area pertambangan. Selain itu, sumber pendapatan lain dari buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah perlu melindungi mata pencaharian mereka sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengintegrasikan kehidupan berbasis alam. Pemerintah perlu mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti kawasan pariwisata, kerajinan, dan karya seni. Pemerintah juga perlu memperkuat kelembagaan desa. Ini harus dilakukan bersama dengan perusahaan tambang secara serius. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga kesatuan tata ruang desa dan perencanaan tata ruang.

Kata Kunci: Area Pertambangan; Ekonomi Lokal; Lingkungan; Mata Pencaharian; Pembangunan Pedesaan

1. Pendahuluan

Aktivitas tambang batu bara banyak mempengaruhi perekonomian Kalimantan Timur. Output sektor pertambangan dari tahun 2011 hingga 2014 melebihi setengah dari kontribusi sektor lainnya, yaitu 56,69%, 57,11%, 55,21%, dan 50,11% ([Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2016](#)). Hal tersebut menunjukkan betapa ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor pertambangan, terutama batu bara.

Sebagian kecil masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari pertambangan, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Penghasilan mereka sebagai pekerja pertambangan berlipat ganda. Mereka mendapatkan asuransi kesehatan dan fasilitas mewah lainnya dari perusahaan, yang hampir tidak dapat diberikan oleh perusahaan lain. Pada saat yang sama, pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.

Namun, perusahaan tambang batu bara hanya mendongkrak kinerja makroekonomi namun belum mampu menjangkau secara signifikan di tingkat masyarakat. Indeks Rasio Gini Kalimantan Timur tahun 2011-2014 meningkat dari 0,32 menjadi 0,36 ([Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014](#)). Kenaikan nilai indeks menunjukkan bahwa kinerja ekonomi sedang mengalami *trade-off* dengan pendapatan masyarakat. Kegiatan sektor pertambangan meningkatkan kinerja daerah tetapi tidak berkorelasi kuat dengan distribusi pendapatan.

Selain itu, sektor pertambangan memiliki banyak “catatan buruk” terkait kerusakan lingkungan, menipisnya mata pencaharian masyarakat, kerapuhan sistem budaya dan nilai sosial, serta berkurangnya rasa saling percaya antar masyarakat. Masalah utamanya adalah konflik dan melemahnya ikatan sosial. Situasi ini membuat masyarakat terasing dari nilai-nilai budaya akibat keterasingan sosial. Hal itu tercermin dan terjadi di Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, khususnya pada suku Dayak Kenyah Lepoq.

Jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 61.441 jiwa yang tersebar di 18 desa ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Karta Negara, 2014](#)). Tujuh belas perusahaan pertambangan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, dan tujuh perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. Areal yang dikuasai oleh perusahaan tambang dengan IUP operasi produksi seluas 21.862,15 hektare (setara 47,1%) dari total luas Kecamatan Tenggarong Seberang ([Gandi & Sunito, 2015](#)). Lahan yang dikuasai oleh perusahaan pertambangan telah mengubah lahan pertanian masyarakat Dayak Kenyah, mempengaruhi sistem mata pencaharian mereka yang bertumpu pada pertanian lahan berpindah ([Maunati, 2003](#)). Ruang bagi mereka untuk mengolah lahan akan terisolir karena perusahaan tambang sudah menguasai lahan tersebut. Keberadaan perusahaan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kolektif suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai. Sebagian kecil dari mereka merupakan tenaga kerja manual di perusahaan.

Masyarakat petani menghadapi permasalahan baru yang tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan pertambangan. Pembuangan limbah perusahaan di Sungai Separi merusak sumber mata pencaharian masyarakat Dusun Barambai yang bersumber dari sungai. Sungai Separi merupakan sumber mata pencaharian dan kebutuhan protein penting bagi masyarakat Dayak Kenyah di Dusun Berambai. Setiap hari mereka mengkonsumsi ikan dari sungai dan menjual sebagiannya ke pasar.

Ekonomi lokal, sosial budaya, dan nilai budaya yang kuat “rusak” akibat pencemaran Sungai Separi dari limbah perusahaan. Eksploitasi sumber daya alam di pertambangan batu bara yang awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari pembangunan pedesaan menimbulkan masalah ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Sebelum perusahaan tambang batu bara masuk dan beroperasi di Dusun Berambai, kehidupan suku Kenyah Lepoq stabil mengikuti kaidah norma dan kaidah budaya. Kohesi sosial antar masyarakat cukup kuat, terutama pada saat upacara perkawinan, hajatan lainnya, eksploitasi lahan pertanian, renovasi rumah, dan gotong-royong pada kegiatan Dusun Berambai.

Ketika perusahaan tambang batu bara sudah beroperasi pada 2005, masyarakat sudah mulai merasakan dampak limbah perusahaan. Aktivitas pertambangan yang mencemari sungai perlahan menggerus mata pencaharian masyarakat. Di sisi lain, perluasan areal pertambangan perusahaan tambang telah mempersempit ruang gerak kegiatan pertanian yang mengancam mata pencaharian pertanian dan perikanan suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai. Apalagi, kapitalisasi dan eksploitasi tambang besar-besaran mengikis unsur budaya, ekonomi lokal, dan rasa saling percaya. Peran pemerintah dalam melindungi mata pencaharian, ekonomi lokal, dan potensi pariwisata dari kegiatan perusahaan tambang belum maksimal. Pemerintah perlu menjaga dan menjadikan mata pencaharian dan potensi wisata menjadi nilai ekonomi baru di dusun tersebut.

Selanjutnya, produk budaya suku Dayak Kenyah mengalami penurunan akibat perubahan gaya hidup akibat kegiatan pertambangan. Ritual budaya seperti perkawinan, berkebun, dan ritual lainnya berangsur-angsur berkurang, yang merupakan masalah baru yang tidak disadari masyarakat selain kegiatan pertambangan mengganggu mata pencaharian mereka. Adanya kegiatan pertambangan semakin mengasingkan unsur budaya dan nilai masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang berdampak pada sumber mata pencaharian dan pelestarian budaya, seperti gotong-royong dan ritual budaya.

Masyarakat Dayak Kenyah memiliki potensi seni dan budaya yang akan menjadi mata pencaharian dan sumber pelestarian budaya jika dikelola dengan baik. Gong, Kulintang, dan Gendang Panjang merupakan alat musik tradisional yang digunakan dalam musik dan tarian masyarakat Dayak Kenyah sebagai pertunjukan hiburan bagi wisatawan (Haryanto, 2015). Desa Budaya Pampang merupakan salah satu wujud pelestarian budaya Dayak Kenyah sebagai bagian dari pengembangan pariwisata. Musik Sampek, musik tradisional Dayak Kenyah, merupakan pertunjukan bagi wisatawan (Hadibrata, 2016). Pelestarian budaya dapat menjadi salah satu cara alternatif untuk memelihara budaya sekaligus menjadi sumber mata pencaharian baru. Pelestarian budaya juga sebagai upaya memodernisasi suku Dayak Kenyah yang bermukim di Dusun Berambai.

Pertambangan bisa eksis secara harmonis dan berintegrasi dengan pola kehidupan dan budaya. Lebih lanjut, perusahaan dapat membantu menyebarkan budaya dengan memperkenalkan budaya Dayak Kenyah sebagai produk pariwisata. Pembangunan desa berbasis agrowisata dapat mengembangkan ekonomi dan sumber penghasilan lokal, seperti yang terjadi di Afrika Selatan yang mengembangkan desa dengan metode agrowisata. Agrowisata memiliki arti penting khusus bagi perkembangan ekonomi kota kecil di ruang pariwisata di Afrika Selatan. Kebijakan yang ditawarkan adalah memperkuat agrowisata sebagai penggerak Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) di Afrika Selatan (Rogerson & Rogerson, 2014).

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Lembaga publik harus menyadari kapasitas suatu daerah dan mencoba membantu mengembangkan daerah itu. Kebijakan pariwisata lokal menuju keberlanjutan sangat diperlukan untuk pengembangan suatu daerah di masa depan (Pedrana, 2013). Pelestarian berkelanjutan pada budaya dan seni dapat memperkuat ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenian Jaranan (nama kesenian suatu daerah) memiliki daya tarik yang

besar di masyarakat kota Kediri. Setiap pagelaran, banyak pedagang kecil yang berjualan perlengkapan dan meningkatnya jumlah perajin yang hidup dari daya tarik kesenian Jaranan (Dewandaru & Purnamaningsih, 2017).

Dibutuhkan komitmen dari daerah untuk membangun sektor budaya dan pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah. Sektor pariwisata memberikan nilai tambah yang mempengaruhi industri kuliner, oleh-oleh, dan kerajinan tangan bagi perekonomian masyarakat kota Batu, Jawa Timur. Pembangunan masyarakat di daerah dikembangkan dengan konsep *community development* dengan harapan dapat membentuk masyarakat yang kuat dan mandiri, sumber daya inovasi yang bernilai, serta mendorong kerjasama lintas sektor dalam membangun desa wisata (Aulya *et al.*, 2016).

Selain itu, masyarakat tidak memperoleh kepemilikan bersama (*common property right*) dari pemerintah. Itu membuat hak milik masyarakat adat berpindah dengan sangat cepat ke dalam properti perusahaan (Bromley & Cernea, 1989). Kapitalisme tampaknya memanfaatkan sikap oportunis untuk mendekati pemerintah guna memperoleh manfaat yang optimal atas kepemilikan bersama tanpa memandang suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai.

Menurut Hodgson (2004), potensi atau realitas oportunisme muncul sebagai sumber “biaya transaksi” yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Sikap oportunisme ekstrim dapat mereduksi komitmen seseorang, memicu konflik, dan menurunkan rasa saling percaya, seperti yang terjadi di Dusun Berambai. Oleh karena itu, penegakan aturan menjadi signifikan di antara pelaku utama dalam menentukan nilai dari apa yang menjadi hak para pelaku utama (Coase, 2013). Dalam konteks penelitian, perlu diketahui nilai apa yang berhak diterima masyarakat setelah perusahaan tambang batu bara beroperasi.

Pelaku utama berusaha untuk menghasilkan pertukaran informasi yang serupa dengan para pelaku dan terjadi dalam struktur relasi sosial yang menjadi basis modal sosial. Menurut Coleman (1988), sedikitnya ada tiga hal yang mengatur struktur hubungan sosial, yaitu: (1) ikatan, (2) saling percaya, dan (3) harapan. Selanjutnya, modal sosial akan mendorong pertukaran hubungan, kerjasama, dan membangun demokrasi di tingkat masyarakat (Putnam, 2001). Jika oportunisme mendominasi, akan ada ketidakpercayaan dalam membangun hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, dan biaya transaksi sangat besar. Menurut Bardhan (1996), biaya transaksi di pedesaan sangat minim karena kedekatan hubungan dalam populasi. Namun, biaya transaksi dapat menjadi lebih menonjol ketika kepercayaan bersama ditolak (Fukuyama, 1995). Siklus ekonomi lokal seperti gotong royong yang rapuh menyebabkan setiap kegiatan pertanian membutuhkan biaya. Membuat kontrak antar pelaku merupakan hal penting yang saling menguntungkan dan dilandasi kepercayaan. Allen & Lueck (2008) menyatakan bahwa biaya transaksi akan berkurang ketika kedua aktor tersebut membangun reputasi dan menerima *common law* yang berlaku di masyarakat. Reputasi seringkali menjadi pertimbangan utama untuk membangun kerjasama (Keefer & Knack, 2008).

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan *Rapid Rural Approach* (RRA), wawancara, observasi langsung, dan interpretasi. RRA adalah cara mengambil data dengan cepat menggunakan kemampuan panca indera (Chambers, 1992; Freudenberg, 1999). Wawancara dilakukan secara bertahap melalui *snowball sampling* untuk memperkuat hasil observasi (Onwuegbuzie *et al.*, 2009). Tokoh masyarakat yang dipilih adalah kepala dusun, masyarakat suku Dayak, dan informan kunci. Selanjutnya melakukan observasi lapangan secara langsung khususnya pengamatan sungai yang tercemar, lahan yang ditempati, dan anak sungai yang masih asri.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Bukit Pariaman terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Sukamaju, Dusun Sukarejo, Dusun Sukasari, Dusun Sukakarya, dan Dusun Berambai. suku Dayak Kenyah Lepoq merupakan suku yang dominan di desa tersebut. Berbeda dengan empat dusun lainnya di Desa Bukit Pariaman, etnis yang dominan di Dusun Berambai adalah suku Jawa dan Kutai. Ada banyak orang Jawa di desa akibat pengaruh transmigrasi pada 1980-an.

Menurut Maunati (2003), suku Dayak Kenyah merupakan bagian dari rumpun suku Dayak Apokayan. suku Dayak yang termasuk dalam rumpun suku Dayak Apokayan adalah Dayak Kenyah, Dayak Kayan, dan Dayak Bahau. Rumpun suku Dayak Apokayan telah merantau ke beberapa daerah sekitar tahun 1970-an. Menurut Haryanto (2015), suku Dayak Kenyah mendiami Kalimantan Timur.

Tabel 1. Sebaran Geografis Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur

Nama Suku	Provinsi	Kabupaten	Lokasi
Dayak Kenyah	Kalimantan Utara	Bulungan	Desa Jelerai Selor Kecamatan Tanjung Palas
		Malinau	Kecamatan Kayan Hulu
	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	Kecamatan Long Bagun
		Kutai Kartanegara	Kecamatan Tabang
		Kutai Timur	Kecamatan Muara Wahau Kecamatan Muara Ancalong
		Kutai Barat	Kecamatan Long Iram
		Berau	Kampung Long Lanuk (Kelurahan Sambaliung)

Sumber: Haryanto (2015)

Pertanian dan perikanan merupakan mata pencaharian utama suku Dayak Kenyah Lepoq, seperti bercocok tanam, bercocok tanam, memancing, dan mata pencaharian lainnya sebagai tukang untuk penghasilan tambahan. Budidaya sawah menggunakan teknik pertanian tadah hujan dimana pemanenan hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Di sisi lain, mereka menggunakan teknik pertanian beririgasi di empat dusun berbeda di mana panen dilakukan dua kali dalam 1 tahun. Varietas padi yang mereka gunakan di Dusun Berambai berasal dari varietas lokal. Varietas yang disebut warga tersebut adalah (1) Pada'i Kawan, (2) Pada'i Ubek, (3) Pada'i Bo'o, dan (4) Pada'i Timur. Varietas yang paling disukai adalah Pada'i Bo'o.

Hasil panen dari banyak varietas lokal tidak mencukupi kebutuhan petani dalam 1 tahun. Untuk mendapatkan padi/beras, mereka membeli atau menerima program bantuan dari pemerintah melalui program Raskin (Beras untuk Orang Miskin). Hasil panen tersebut cukup untuk memenuhi skala produksi dengan membuat lahan baru, namun sebagian hasil panen dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti pendidikan, jaminan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Saat musim panen selesai, suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai memanfaatkan

ladang untuk menanam tanaman sela seperti jagung, pisang, sayur, dan ubi kayu atau terkadang mencari pelepah di sekitar hutan. Sedangkan untuk kebutuhan buah-buahan, mereka membudidayakan pisang, durian, langsung, rambutan, dan mangga. Sumber buah sebagian besar berasal dari hutan, seperti durian, rambutan, dan langsung.

Namun, mata pencaharian mereka terancam hilang akibat masifnya penambangan batu bara yang terjadi di dusun tersebut. Sungai di sepanjang dusun mereka tercemar akibat pembuangan limbah oleh perusahaan. Limbah produksi batu bara yang mencemari Sungai Separi mempengaruhi mata pencaharian dan penghidupan suku Kenyah Lepoq. Masyarakat Dusun Berambai sudah tidak bisa lagi memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumber air minum, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), dan kesulitan menangkap ikan.

Pasar ikan yang muncul setiap bulan sudah tidak ada lagi di desa. Sebagian besar masyarakat suku Dayak Kenyah Lepoq tidak lagi mencari ikan sebagai mata pencaharian karena Sungai Separi sudah tercemar parah. Pencemaran Sungai Separi telah merusak mata pencaharian. Perusahaan pertambangan batu bara menghilangkan ekonomi lokal pertama yang bersumber dari alam dan berkelanjutan, menyatu dengan budaya dan mata pencaharian. Akibatnya, sebagian besar areal/lahan budidaya terfragmentasi.

Perusahaan Tambang PT Mahakam Sumber Jaya telah melakukan operasi penambangan sejak tahun 2006. Sedangkan masyarakat Dayak Kenyah dari keluarga suku Dayak Apokayan tinggal di Dusun Berambai pada tahun 1990-an. Orang Dayak Kenyah hidup dengan damai. Ikan di Sungai Separi sangat melimpah sehingga masyarakat suku Dayak dapat memanennya untuk memenuhi kebutuhan makan setiap saat.

Selama beberapa dekade, sumber mata pencaharian mereka telah menyatu dengan alam dan cukup untuk menopang kehidupan. Namun, saat ini mereka masih harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan air minum dan ikan, bahkan beras. Di sisi lain, produk mata pencaharian yang layak jual seperti ikan sudah tidak ada lagi, sehingga mereka harus mencari sumber mata pencaharian lain dengan menjadi buruh lepas atau pekerjaan lain. Industri pertambangan menciptakan "pemiskinan" karena menghilangkan sumber mata pencaharian dan tidak menggantikan sumber mata pencaharian baru. Apalagi industri pertambangan menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah tersebut harus pindah. Mereka tidak bisa mengkonsumsi air sungai dan tidak bisa menggunakannya untuk mandi, mencuci, atau jamban karena sudah tercemar. Beberapa keluarga sudah meninggalkan rumahnya dan mencari kehidupan baru meski ada kompensasi dari perusahaan tambang. Sementara itu, beberapa keluarga masih bertahan karena belum tahu mau kemana.

Beberapa dari mereka berusaha mempertahankan sumber daya yang tersisa untuk digunakan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian. Mereka memanfaatkan lahan yang bukan tambang menjadi lahan pertanian dan budidaya. Meski hidup dalam "ketidakpastian" sumber daya, mereka tetap berharap bahwa sumber daya yang dimiliki dan milik bersama (sungai dan tanah/lahan) tidak akan berpindah kepemilikan dan menjadi tambang batu bara. Mereka hidup di bawah tekanan dan ketidakpastian, tetapi mereka tetap hidup berdasarkan nilai-nilai budaya dan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka memenuhi pola mata pencaharian adalah kearifan lokal. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan mempertahankan siklus hidup alam tanam, pelestarian alam yang melekat pada nilai-nilai dan cara produksi merupakan ekonomi lokal.

Mereka terus mengolah sumber daya yang tersisa sesuai dengan budaya yang mereka miliki. Pola mata pencaharian tetap menyatu dengan alam dengan tidak menentang kehadiran modernisasi, tercermin dari bagaimana suku Dayak sangat merawat Sungai Bambu (Lalut

Bulog). Mereka melestarikan daerah aliran sungai dengan menjaga penutup lahan (*land cover*). Meskipun Sungai Bambu merupakan anak sungai, namun memiliki keanekaragaman jenis ikan dan air sungai yang jernih yang dapat dikonsumsi langsung sebagai air minum karena suku Dayak Kenyah Lepoq melindungi dan melestarikan alam dengan memadukan mata pencaharian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian lokal masih tetap eksis di tengah ancaman permodalannya. Hukum termodinamika dengan memanfaatkan hukum transfer energi dilestarikan dan diwujudkan justru oleh suku Dayak Kenyah Lepoq melalui perekonomian lokal.

Proses tersebut merupakan proses keseimbangan antara alam dan manusia. Siklus kehidupan berjalan dengan mengikuti kehidupan alam sambil menghasilkan produksi dan mata pencaharian. Cara mereka memperlakukan alam dengan menanamkan budaya dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan bahwa mereka menghargai kualitas dan orisinalitas membangun yang penuh cinta dan hidup berdampingan dengan modernisasi.

Mereka membangun desa dengan alam, tetapi orang lain yang datang dengan modal besar merusak desa dan memiskinkan masyarakat. Mereka menempati lahan untuk mendapatkan tambang. Perusahaan menggunakan uang sebagai alat kompensasi, tetapi sekaligus dalam penguasaan lahan, merusak budaya dan pola mata pencaharian dan membuat mereka tidak berdaya.

Pembangunan desa bukanlah suatu akumulasi tetapi harus menempatkan unsur pembangunan budaya dan manusia. Modal tidak berkembang bagi suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai, namun modal dan akumulasi modal mengancam mata pencaharian mereka. Kapitalisasi menjadi ancaman bagi eksistensi perekonomian lokal yang terancam hilang di Dusun Berambai. Berikut hasil temuan lapangan dari survei tersebut:

Tabel 2. Hasil Survei Lapangan tentang Kegiatan Eksploitasi Pertambangan

Aktivitas	Efek	Dampak	Solusi
Kegiatan Eksploitasi Pertambangan	Pencemaran Sungai Separi	Sumber makanan menjadi semakin sulit	- Pemerintah perlu melindungi mata pencaharian masyarakat Dayak Kenyah - Kegiatan pertambangan perlu diintegrasikan dengan kehidupan masyarakat Dusun Berambai - Membangun unsur budaya sebagai bagian dari pembangunan pariwisata - Membangun kembali rasa saling percaya pada masyarakat Dusun Berambai
	Konversi Lahan Pertanian Menjadi Area Pertambangan	- Lahan pertanian menyusut, dan pendapatan dari bertani menurun - Migrasi penduduk	
	Turunnya Ikatan Sosial dan Solidaritas Sosial	- Konflik dan polarisasi masyarakat - Ritual budaya semakin lemah - Unsur seni dan budaya semakin memudar	

Industri pertambangan “menghancurkan ekonomi lokal” dan membuat “konflik permanen” dan saling ketidakpercayaan antar masyarakat suku Dayak Kenyah Lepoq. Masyarakat suku Dayak Kenyah Lepoq yang dulu bersatu kini menimbulkan kecurigaan di antara mereka karena perlakuan “tidak adil” oleh perusahaan tambang. Kehadiran perusahaan tidak menciptakan perdamaian dan tidak bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Suku Dayak Kenyah Lepoq terancam, terpecah, dan menjauhkan diri dari lingkungan tempat mereka berasal. Jika seluruh penduduk pindah maka akan mengancam keberadaan suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai.

Mereka yang bertahan hidup karena berharap lahan yang digunakan masih bisa memberikan sedikit harapan bagi kelangsungan hidup mereka. Simbol budaya yang mereka miliki seperti ritual dan produk dalam seni budaya, dan alat pertanian berangsur-angsur menuju kepunahan. Sumber daya mereka adalah sebidang tanah yang bisa hilang seketika ketika kekuatan modal memaksa mereka untuk keluar dari tanah. Hukum tidak melindungi mereka karena pengawasan pemerintah yang lemah. Pemerintah harus bisa mengintervensi dan membela suku Dayak agar tidak terpinggirkan dalam asal usul dan perkembangannya.

Pemerintah harus mengupayakan dan memaksimalkan perannya dalam melindungi, memberdayakan, dan memelihara perekonomian lokal agar tetap berkelanjutan dalam konteks dimensi spasial dan sosial budaya. Namun kesan yang muncul pada masyarakat suku Dayak Kenyah Lepoq menunjukkan bahwa pemerintah cenderung melindungi korporasi dan investor besar dari perusahaan tambang batu bara.

Kesannya adalah sebagai berikut: (1) kompensasi atas kerusakan. (2) hanya mengutamakan mempekerjakan penduduk sebagai buruh. (3) berkomitmen untuk pelestarian lingkungan. (4) mengancam eksistensi perekonomian lokal. (5) konflik laten masyarakat, dan (6) hilangnya sumber daya milik bersama. Menurut [Subarudi et al. \(2016\)](#), rumusan kebijakan pencegahan konflik di masyarakat adalah (1) pengawasan dan pengendalian dan penegakan hukum, perwujudan harmonisasi regulasi, pelaksanaan tata kelola perizinan yang baik, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, serta kebijakan penggunaan satu peta.

Namun, masyarakat menerima kompensasi tanpa pemberdayaan ekonomi dan pendampingan keterampilan. Uang yang mereka terima tidak cukup untuk menciptakan siklus keuangan baru yang berdampak pada mata pencaharian mereka. Di sisi lain, sumber mata pencaharian seperti ikan sudah tidak mencukupi karena pencemaran sungai. Awalnya, pemenuhan kebutuhan sudah cukup, namun kehadiran perusahaan tambang membuat mereka biaya bertambah dan pengeluaran untuk mencari nafkah, terutama ikan dan air minum.

Keterlibatan suku Dayak sebagai tenaga kerja perusahaan ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat suku Dayak Kenyah Lepoq. Mereka hanya ditempatkan sebagai buruh sedangkan sebagian lainnya tidak bekerja di perusahaan pertambangan. Mereka tidak bekerja di perusahaan dan tidak memiliki tanah mencari sumber mata pencaharian lain untuk bertahan hidup. Apalagi, mata pencaharian mereka tidak lagi mengandalkan sungai karena pencemaran sungai yang masif. Sumber daya suku Dayak Kenyah Lepoq merosot karena kepentingan modal di pertambangan. Bersamaan dengan itu, lemahnya peran pemerintah dalam melindungi suku Dayak Kenyah Lepoq.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran vital dalam menyelesaikan masalah-masalah “kritis” suku Dayak dan memastikan fasilitasi dan aturan keberadaan suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai. Pemerintah harus membatasi eksplorasi tambang batu bara. Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Dusun Berambai dibangun pemerintah dengan mengintegrasikan kehidupan berbasis alam, dimana mata pencaharian mereka berada di Sungai Separi dan menyatu dengan budaya masyarakat Dayak Kenyah. Pemerintah harus melestarikan Sungai Separi. Peran pemerintah antara lain menjaga kesatuan ruang dan tata ruang. Oleh karena itu, perusahaan tambang perlu melindungi dan terlibat dalam pelestarian Sungai Separi. Perusahaan tambang harus bersatu dengan masyarakat dengan tetap menjaga sumber penghidupan masyarakat.

Pembangunan desa berbasis pariwisata perlu mencerminkan keaslian dan keunikan daerah pedesaan tradisional, mulai dari kehidupan sosial budaya sehari-hari, seni adat istiadat, arsitektur, dan lingkungan sekitarnya. Pembangunan desa berbasis pariwisata memungkinkan berkembangnya berbagai fasilitas sehingga wisatawan dapat berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan kontribusi yang positif (Wahyudin, 1999).

Modal sosial yang lemah mendorong biaya transaksi yang lebih tinggi. Beberapa implikasi penurunan modal sosial di Dusun Berambai adalah (1) melemahnya gotong-royong saat tanam dan panen. (2) ketidakpercayaan mendorong peningkatan biaya transaksi. (3) menyusutnya ekonomi lokal di Dusun Berambai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan seluruh kekuatan melalui pendekatan teknokratis kepada masyarakat Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai.

4. Kesimpulan

Perekonomian dan mata pencaharian masyarakat di Dusun Berambai mengalami tekanan dan tergerus oleh aktivitas penambangan batubara. Produk mata pencaharian menyusut drastis, terutama ikan dan beras, akibat limbah tambang yang mencemari sungai dan mengubah lahan pertanian menjadi area pertambangan. Lebih lanjut, sumber pendapatan buruh tani lainnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Suku Dayak Kenyah Lepoq di Dusun Berambai terancam tercerai berai dari tanah mereka karena sebagian besar tersebar dalam proses migrasi untuk bertahan hidup. Hanya sebagian dari mereka yang bertahan hidup di tanah mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Industri pertambangan menjadi penyebab rusaknya perekonomian lokal dan menimbulkan kemiskinan di Dusun Berambai. Selanjutnya, modal sosial mulai terkikis karena memudarnya struktur hubungan sosial yang terutama terkait dengan memudarnya ikatan, kepercayaan, dan ekspektasi.

Pemerintah perlu dan harus melindungi mata pencaharian mereka sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengintegrasikan kehidupan berbasis alam (Wahyudin, 1999) dengan membangun kembali rasa saling percaya melalui pemberdayaan kelompok, pendidikan, kesehatan, dan pendampingan. Pemerintah perlu mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti kawasan pariwisata, kerajinan tangan, karya seni, dan penguatan kelembagaan desa, dengan perusahaan tambang. Lebih lanjut, pemerintah perlu mengintegrasikan kegiatan pertambangan secara berdampingan dengan eksploitasi pertambangan dengan mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Allen, D. W., & Lueck, D. (2008). Agricultural Contracts. In C. Ménard & M. M. Shirley (Eds.), *Handbook of New Institutional Economics* (pp. 465–490). Berlin, Germany: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69305-5_19
- Aulya, R., Mindarti, L. I., & Amin, F. (2016). Strengthening Local Economy Through Community-Based Tourism in Governance Perspective (Study at Sidomulyo Tourism Village, Batu City). *Jurnal Ad'ministrare*, 3(2), 11-30. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2424>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2014). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2014*. Retrieved from <https://kukarkab.bps.go.id/publication/2015/08/13/20e51f7aca7edc18d81291d1/kutai-kartanegara-dalam-angka-2014.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2014). *Koefisien Gini Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Kalimantan Utara), 1996-2014*. Retrieved from <https://kaltim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/17/96/koefisien-gini-kalimantan-timur-menurut-kabupaten-kota-termasuk-kalimantan-utara-1996-2014.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2016). *Laporan Perekonomian Kalimantan Timur 2015*. Retrieved from <https://kaltim.bps.go.id/publication/2016/12/01/0e89e46a6c68275532d1e0c8/laporan-perekonomian-kalimantan-timur-2015.html>
- Bardhan, P. (1996). *The Nature of Institutional Impediments to Economic Development* (Working Paper No. C96-066). Center for International and Development Economics Research. Retrieved from <https://ageconsearch.umn.edu/record/233429/>
- Bromley, D. W., & Cernea, M. M. (1989). *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies* (World Bank Discussion Papers 57). The World Bank. Retrieved from <http://documents1.worldbank.org/curated/en/548811468740174575/pdf/multi-page.pdf>
- Chambers, R. (1992). *Rural appraisal: rapid, relaxed and participatory* (IDS Discussion Paper 311). Institute of Development Studies (UK). Retrieved from <https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/Dp311.pdf>
- Coase, R. H. (2013). The Problem of Social Cost. *The Journal of Law and Economics*, 56(4), 837–877. <https://doi.org/10.1086/674872>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Dewandaru, B., & Purnamaningsih, N. (2017). Strategi Dalam Memajukan Industri Kreatif Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Pada Kesenian Jaranan Di Kota Kediri). *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 170-187. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/article/view/8>
- Freudenberger, K. (1999). *Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA): A Manual for CRS Field Workers and Partners*. Baltimore, Maryland: Catholic Relief Services. Retrieved from <https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/rapid-rural-appraisal-and-participatory-rural-appraisal.pdf>
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York, USA: The Free press.
- Gandi, R., & Sunito, S. (2015). Industrialisasi Pertambangan dan Deagrarianisasi Masyarakat Desa (Studi Kasus Masyarakat Desa Embalut dan Desa Bangunrejo, Kecamatan

- Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 50–62. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.9431>
- Hadibrata, W. (2016). *Musik Sampek Sebagai Kemasan Wisata Di Desa Pampang Samarinda Kalimantan Timur* (Thesis). Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Retrieved from <http://digilib.isi.ac.id/1420/>
- Haryanto. (2015). *Musik Suku Dayak: Sebuah Catatan Perjalanan Di Pedalaman Kalimantan*. (M. H. B. Raditya, Ed.). Retrieved from <https://core.ac.uk/reader/160643260>
- Hodgson, G. M. (2004). Opportunism is not the only reason why firms exist: why an explanatory emphasis on opportunism may mislead management strategy. *Industrial and Corporate Change*, 13(2), 401–418. <https://doi.org/10.1093/icc/dth016>
- Keefer, P., & Knack, S. (2008). Social Capital, Social Norms and the New Institutional Economics. In C. Ménard & M. M. Shirley (Eds.), *Handbook of New Institutional Economics* (pp. 701–725). Berlin, Germany: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69305-5_19
- Maunati, Y. (2003). *Identitas Dayak*. Jakarta, Indonesia: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Onwuegbuzie, A. J., Dickinson, W. B., Leech, N. L., & Zoran, A. G. (2009). A Qualitative Framework for Collecting and Analyzing Data in Focus Group Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(3), 1–21. <https://doi.org/10.1177/160940690900800301>
- Pedrana, M. (2013). Local economic development policies and tourism: An approach to sustainability and culture. *Regional Science Inquiry Journal*, 5(1), 91–99. Retrieved from http://www.rsijournal.eu/ARTICLES/June_2013/RSI%20J%20June%202013%20Volume%20V%20Number%201%20final-v.pdf
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and Consequences. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 41–51.
- Rogerson, C. M., & Rogerson, J. M. (2014). Agritourism and local economic development in South Africa. *Bulletin of Geography. Socio-Economic Series*, 26(26), 93–106. <https://doi.org/10.2478/bog-2014-0047>
- Subarudi, R., Kartodihardjo, H., Soedomo, S., & Sapardi, H. (2016). Kebijakan Usaha Tambang Batubara di Kawasan Hutan: Studi Kasus Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), 53–71. Retrieved from <https://ejournal.fordamof.org/latihan/index.php/JAKK/article/view/1314>
- Wahyudin, H. (1999). *Pengembangan Obyek Wisata Pampang Kotamadya Dati II Samarinda Ungkapan Citra Ekokultural Arsitektur Lamin Landasan Konseptual Perancangan* (Thesis). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19427>

Tentang Penulis

1. **Arman**, memperoleh gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Bioindustri, Universitas Trilogi, Indonesia.
E-Mail: arman@universitas-trilogi.ac.id
2. **Asep Saefuddin**, memperoleh gelar Doktor dari University of Guelph, Kanada, pada tahun 1996. Penulis adalah Guru Besar pada Program Studi Statistika dan Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Indonesia.
E-Mail: asaefuddin@ipb.ac.id